

**ANALISIS HUKUM INVESTASI INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK
BERBASIS SAMPAH: TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 27/P/HUM/2016 tentang PEMBATALAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2016**

Intisari

Yogi Prasetyo¹, Wahyu Yun Santosa²

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan secara akademisi landasan yang digunakan dalam penerbitan kebijakan percepatan investasi tenaga listrik berbasis sampah serta pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini bersifat normatif, penelitian dilakukan dengan cara dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan investasi dan lingkungan hidup dalam terapannya terhadap putusan Uji Materiil Mahkamah Agung tentang pembatalan peraturan presiden. Nomor 18 tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan percepatan investasi infrastruktur tenaga listrik berbasis sampah memiliki landasan yang kuat yaitu amanat Peraturan Perundang-Undangan di atasnya serta Instruksi Presiden yang menginstruksikan untuk dilakukannya percepatan kebijakan tersebut. Terkait dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam putusan uji materiil terhadap Perpres PLTSa justru menghambat pelaksanaan kegiatan investasi infrastruktur tenaga listrik berbasis sampah.

Kata kunci: Investasi Infrastruktur , Tenaga Listrik , Uji Materiil

¹ Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
(yogiprasetyo92@gmail.com)

² Dosen Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF LAW ON WASTE-BASED ELECTRICITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT: A REVIEW OF SUPREME COURT DECREE NUMBER 27/P/HUM/2016 REGARDING THE CANCELLATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 18 OF 2016

By

Yogi Prasetyo³, Wahyu Yun Santosa⁴

This research aims to find out, to analyze, and to explain the academic foundation used in issuing policy of accelerating waste-based electricity investment as well as legal consideration in the Supreme Court decree regarding the cancellation of Presidential Regulation Number 18 of 2016.

This research is normative research, which is conducted by examining and analyzing the scope and material of terms and condition related to the investment and environment in the implementation of Material Test of Supreme Court decree regarding the cancellation of Presidential Regulation Number 18 of 2016.

Based on the research result, policy of accelerating waste-based electricity infrastructure investment has a strong foundation, namely the mandate of the Constitution above it and Presidential Instruction ordering the implementation of the acceleration of the policy. In fact, the legal consideration taken by Supreme Court in the judicial review on the Presidential Regulation on PLTSa actually inhibits the implementation of waste-based electricity infrastructure investment.

Keywords : infrastructure investment, electricity, material test

³ Student of Graduate Program of Faculty of Law, Gadjah Mada University, (yogiprasetyo92@gmail.com)

⁴ Lecturer of Environment Law in Faculty of Law, Gadjah Mada University



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Hukum Investasi Infrastruktur Tenaga Listrik Berbasis Sampah : Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2016 tentang Pembatalan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016

YOGI PRASETYO, Dr. Wahyu Yun Santosa, S.H., M.Hum., LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>